

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ali Achmad, *Pengawasan Kinerja Kejaksaan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 2009)

al-Farra, *al- 'Ahkam as-Sulthaniyyah*

Arinanto Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Aripin Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2008)

Assegaf Rifkidan Nur Syarifah, *Membandingkan Komisi-Komisi Pengawas Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum, dalam JENTERA* (Jakarta: PSHK, 2006).

Basiq A Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).

Effendy Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Hidayat Taufik, *Al-Qur`an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2020)

Nawawi Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Erlangga, 1995)

Jimly dan Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK RI, 2006).

Lay Comelis, *Sitate Auxiliary Agencies, dalam JENTERA: Komisi Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2006).

Rakatama Aditiya, *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan* Universitas Diponegoro (Semarang, 2008)

Salam Muhammad Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, terj. Imron AM  
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,  
(Bandung: Alfabeta, 2015).

Wahidin Syamsul, *Dimensi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar, 2012)

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan  
RI

UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-  
009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-  
002/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan  
Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Susunan  
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-115/JA/10/1999, tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik  
Indonesia

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-503/A/JA/12/2000 tentang  
Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan  
RI

### **C. Internet**

digilib.unila.ac.id/9222/2/BAB%20I.pdf. Diakses pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 20.00 WIB.

<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewfile/18304/14504>

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1).

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=8](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=8).

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3).

<https://komisi-krjaksan.go.id/meninjau-kekhurusan-jaksa-dalam-menerapkan-uu-asn>

<https://www.kasn.go.id/details/item/559-komisi-kejaksaan-ri-dan-komisi-asn>

<http://digib.uinsby.ac.id/43909/>

### **D. Jurnal**

Ardie, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian*. Vol IX No. 12.

Inas Diasa Wishesa, *Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit*. Vol 9 No. 19

Sabri Samin, *Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum*. vol.3 No.1

Sudrajat Tatang, *Analisis Tentang Fungsi Tugas dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Vol 7 No.18.